



Buletin Parlementaria

Nomor 1007/III/V/2018 • Mei 2018



SEMINAR NASIONAL

Tema :
PEMILU NASIONAL SERENTAK 2019: DINAMIKA DAN TANTANGAN



Mahasiswa Kendari Sambut Baik Parlemen Kampus 2018

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



SDM Pariwisata Kalteng Perlu Diperkuat



Foto: Runit/od

Peserta Parlemen Kampus 2018 dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari dan Institut Agama Islam Kendari

Mahasiswa Kendari Sambut Baik Parlemen Kampus 2018

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga legislatif di Indonesia, harus mampu memberikan pembelajaran politik kepada generasi penerus bangsa yang akan datang. Melalui kegiatan Parlemen Kampus 2018 yang diadakan oleh DPR RI, diharapkan memberikan pendidikan politik kepada generasi muda dan menjadi tema yang baik, karena Indonesia akan segera menghadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Parlemen Kampus 2018 kali ini diadakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Institut Agama Islam Kendari dan Pemerintah Daerah Kendari. Selain Seminar Nasional, rangkaian kegiatan Sekolah Parlemen Kampus 2018, juga diisi dengan simulasi Sidang dan Rapat Kerja yang diikuti oleh mahasiswa terpilih.

“Kita memerlukan pikiran baru dan juga arah baru yang belum ada saat ini. Sehingga diskusi seperti ini bisa membantu agar putra-putri dari daerah bisa memunculkan pikiran-pikiran terbaik, supaya kita bisa mengolah Indonesia menjadi

lebih benar,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Seminar Nasional ‘Pemilu Nasional Serentak 2019: Dinamika dan Tantangannya’ di hadapan ratusan mahasiswa, di Gedung Auditorium UHO, Kendari, Sultra, Kamis (3/5).

Pimpinan DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu berharap, dengan adanya kegiatan Parlemen Kampus ini, generasi muda menjadi lebih berani dan berpikir kritis terhadap Indonesia. Sehingga nantinya dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dapat membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

“Mahasiswa zaman sekarang juga harus ikut mempelajari karakter pemimpin. Pemimpin jangan cuma ditonton tapi harus dibaca dan diperiksa. Mahasiswa juga harus berani berpikir, karena Indonesia membutuhkan tenaga baru dari dalam diri sendiri, karena

Indonesia itu besar sekali,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat banyak generasi pemuda kurang mengerti sistem demokrasi Indonesia. Padahal, generasi muda mempunyai peran penting bagi demokrasi Indonesia di masa depan.

Kemajuan teknologi juga harus diikuti dengan berkembangnya sistem demokrasi Indonesia. Generasi muda harus ikut aktif dalam membangun demokrasi Indonesia di masa depan, dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi secara cermat dan teliti.

“Kepada pemilih pemula apalagi generasi zaman sekarang yang setiap hari bermain media sosial, harus lebih cermat dan teliti dalam memilih partai politik apalagi memilih calon legislatif juga calon



presiden. Gunakanlah teknologi informasi yang dimiliki dan dikuasai secara baik dan bertanggung jawab,” kata Riza.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti dalam sambutannya berharap melalui kegiatan Parlemen Kampus 2018 yang diadakan oleh DPR RI, diharapkan memberikan pendidikan politik kepada generasi muda dan menjadi tema yang baik, karena Indonesia akan segera menghadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres.

“Parlemen itu harus memberikan pembelajaran politik kepada generasi muda. Untuk itu, DPR RI sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan acara seperti ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Antara praktek dan teori bisa masuk, serta menjadi ajang bagi DPR untuk dapat memberikan pendidikan politik pemula khususnya bagi para mahasiswa,” kata Maya, panggilan akrab Damayanti.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI Y.O.I. Tahapari mengatakan, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi, perlu mengetahui situasi dan kondisi politik. Untuk itu, DPR memberikan program dukungan yang mengajari cara berpolitik yang benar, sehingga masyarakat bisa belajar mengenai kondisi politik.

“Kegiatan seperti ini dapat menjadikan mahasiswa mengerti tentang pentingnya

pemilu. Sehingga mereka tidak akan menjadi golput karena mereka akan sadar, jika mereka tidak memilih akan berdampak bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang,” paparnya.

Wakil Rektor IAIN Husein Insawan dalam sambutannya mengaku, pihaknya menyambut baik dengan diselenggarakannya Parlemen Kampus ini. Karena DPR sudah punya *political feeling* untuk memberikan edukasi politik tentang demokrasi di Indonesia. Ia mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh DPR ini. Menurutnya, kinerja DPR makin hari terus membaik dalam membangun komunikasi dan menyampaikan cara-cara berdemokrasi yang benar kepada masyarakat.

“Kalau dulu paradigma DPR hanya sekedar menunggu, tetapi sekarang sudah langsung turun ke lapangan mendekati masyarakat, dan membangun komunikasi utamanya kepada mahasiswa. Kegiatan-kegiatan seperti ini mesti dipertahankan, dan kalau bisa dikembangkan dan terus dilanjutkan di masa yang akan datang. Tentunya harus lebih besar, bukan hanya melibatkan mahasiswa tetapi juga bisa mengundang anak-anak sekolah,” harapnya. ■ tn/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrullli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Gerald Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



INNALILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI'UN

• SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA •
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT serta
SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

TURUT BERDUKA CITA
 yang sedalam-dalamnya atas wafatnya



Hj. Tri Murny, SH.

Anggota Komisi VIII DPR RI
 Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
 Dapil Banten I
 Senin, 7 Mei 2018

Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT
 dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan



Ketua DPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Plt Sekjen DPR Damayanti serta jajaran Direksi Tempo membuka rangkaian acara Peringatan 20 Tahun Reformasi

Foto: Andri/Zk

Ketua DPR: Lanjutkan Konsolidasi untuk Jalani Demokrasi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur melalui perjuangan yang panjang, transisi demokrasi Indonesia dapat dilalui dengan baik. Tugas berikutnya adalah melanjutkan konsolidasi agar demokrasi menjadi jalan yang lapang untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial.

“Dua puluh tahun lalu, di area gedung DPR ini para mahasiswa dan berbagai elemen bangsa menorehkan sejarah membawa negara kita ke arah demokrasi. Berbagai agenda reformasi akan terus dijalankan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada demokrasi prosedural, tetapi harus berikhtiar memberi makna pada substansi demokrasi,” ujar Bamsot, sapaan akrabnya, saat membuka rangkaian acara Peringatan 20 Tahun Reformasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Acara Peringatan 20 Tahun Reformasi dilakukan atas kerjasama DPR RI dengan Tempo Group. Mengambil tema ‘Kembali ke Rumah Rakyat’, akan ada serangkaian kegiatan pada 7-21 Mei 2018. Antara lain Diskusi Publik Kiprah Aktivistis 1998 sebagai Anggota DPR, Pameran Foto Reformasi, Diskusi Publik Anak Muda di Era Reformasi, Panggung Puisi dan Musik, dan Peringatan Malam Refleksi 20 Tahun Reformasi.

Bamsot mengajak para elit

politik maupun tokoh publik bisa menumbuhkembangkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Karena apa yang dilakukan masyarakat, tak terlepas dari pengaruh para elit yang menjadi panutan.

“Demokrasi membuka peluang kepada siapapun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran bersaing secara sehat. Kita harus siap meraih kemenangan dan siap pula menerima kekalahan. Jika tidak, demokrasi kita akan rusak dan perpecahan antar anak bangsa sangat mungkin terjadi,” tutur Bamsot.

Politisi Partai Golkar ini menyadari, dua puluh tahun perjalanan reformasi bukan waktu yang singkat. Sebagai lembaga perwakilan, DPR RI telah melakukan berbagai upaya dalam menegakan demokrasi. Proses *check and balances* terus berlangsung dengan baik guna memastikan

tidak terjadi *abuse of power*.

“Jika 20 lalu para mahasiswa menyerukan reformasi di Gedung DPR RI, maka sekarang mari kita kembali ke rumah rakyat ini untuk menggaungkan kembali berbagai agenda reformasi yang belum terwujud. Satu diantaranya dalam pemberantasan korupsi. Saya serukan, mari berjihad melawan korupsi,” ucap Bamsot.

Seruan jihad terhadap korupsi bukan tanpa alasan. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini melihat, selama dua puluh tahun perjalanan reformasi, belum terlihat tanda-tanda kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih rendah. Menurut Transparency International, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara, dengan nilai 37.

“Selaku pimpinan maupun kolega, saya mengajak para anggota dewan bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari praktik korupsi. Tugas DPR bukan membuat undang-undang yang memperlemah, melainkan melahirkan undang-undang yang memperkuat pemberantasan korupsi,” pungkas Bamsot.

■ rnm/sf

DPR-Parlemen Uni Eropa Bahas Perkembangan Kerja Sama

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Delegasi Parlemen Uni Eropa. Dalam pertemuan ini dibahas beberapa perkembangan, diantaranya perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), perundingan Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN dan Uni Eropa (UE) atau ASEAN-EU FTA, dan isu hambatan produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa.

“Ini adalah delegasi besar dari Parlemen Uni Eropa dengan 13 orang anggotanya yang datang. Mereka membawa banyak isu, pertanyaan dan masukan-masukan untuk kita berdiskusi dan bertukar pikiran mulai dari ekonomi, politik, hak asasi manusia, termasuk masalah *global*,” kata Fadli usai

menerima kunjungan Delegasi Parlemen Uni Eropa di ruang delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, pertemuan ini sangat bermanfaat dan termasuk dari bagian dalam membangun strategi *partnership* Indonesia dengan Parlemen Uni Eropa dan kerja sama ASEAN dengan Parlemen Uni Eropa.

“Saya kira pertemuan ini sangat bermanfaat dan bagian dari upaya kita untuk membangun strategi *partnership* dengan Uni Eropa. Dan mereka juga ingin kerja sama Indonesia dengan Parlemen Uni Eropa meningkat, begitu juga ASEAN dengan Parlemen Uni Eropa,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait masalah *palm oil* yang merugikan Indonesia, Parlemen Uni Eropa sudah menerima keluhan dan akan memproses lebih lanjut terkait resolusi Uni Eropa terhadap *palm oil* Indonesia.

“Masalah *palm oil* ini sudah kita sampaikan dan mereka mempunyai pandangan sendiri, mereka meminta

Indonesia untuk bersabar, karena mereka akan membawa isu ini lebih lanjut lagi dalam diskusi,” ujar Fadli.

Seperti yang diketahui resolusi sawit Parlemen Uni Eropa bertujuan agar minyak sawit yang produsen terbesarnya adalah Indonesia tidak dimasukkan sebagai bahan baku program biodiesel Uni Eropa pada 2020.

Industri kelapa sawit dianggap sebagai pemicu utama deforestasi. Padahal, deforestasi bukan hanya disebabkan oleh pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Untuk Indonesia, luas lahan sawitnya sebesar 11,67 juta hektare. Dengan lahan dan industri pengelolaan sawit sebesar itu, maka Indonesia memasok hampir seluruh kebutuhan minyak sawit di dunia.

Dalam pertemuan dengan Delegasi Parlemen Uni Eropa tersebut, turut hadir juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), dan Anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin (Fraksi Partai Gerindra). ■ tn/sf



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berbincang dengan Delegasi Parlemen Uni Eropa

Foto: Runit/od

Komisi III Apresiasi Terobosan Hukum Pidanaan Korporasi



Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto (tengah)

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel), di Palembang, Selasa (8/5). Menurutnya, terobosan ini penting dalam penegakan hukum ke depan.

“Banyak terobosan-terobosan dalam penegakan hukum yang membanggakan kami. Salah satunya penetapan tersangka korporasi pada Maret lalu diputuskan bisa menjadi pidana. Itu terobosan penting di negara ini dalam penegakan hukum ke depan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan korporasi,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Pada bagian lain, Didik juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sumsel yang sangat transparan dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses keadilan dengan mudah. “Kami ingin memastikan penegakan hukum dan akses keadilan masyarakat bisa dijalankan dengan baik sesuai aturan yang berlaku,” harapnya.

Prestasi baik Kejaksaan Tinggi Sumsel ini, sambung Didik, bisa menjadi *trigger* bagi institusi kejaksaan lain di seluruh Indonesia. Dan Kejaksaan Tinggi Sumsel jangan berpuas diri. Prestasi kinerja tersebut harus dipertahankan dengan baik, bahkan terus ditingkatkan. Masyarakat pun bisa dilibatkan dalam mengawasi kinerja kejaksaan ini. ■ mh/sf

Korporasi yang tersangkut kasus pidana, kini bisa dituntut pidana untuk diajukan ke pengadilan. Sebelumnya, bila ada tindak pidana korporasi yang dituntut hanya para pemilik atau jajaran direksinya. Bahkan, banyak kasus pidana yang dilakukan korporasi tak tersentuh hukum. Komisi III DPR RI sangat mengapresiasi terobosan hukum ini.

Persoalan Lansia Tak Hanya Tanggung Jawab Negara

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengungkapkan rasa keprihatinannya terkait banyaknya orang tua lanjut usia (lansia) yang ditelantarkan oleh keluarganya. Dirinya menilai, persoalan lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab pihak keluarga.

“Padahal harapan hidup para lansia itu tumbuh, ketika ada kasih sayang yang didapat, terutama dari keluarga. Nah mestinya pengurusan dan perhatian para lansia itu bukan sekedar menjadi tanggung jawab negara. Meskipun memang negara harus hadir bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Lansia ini merupakan tanggung jawab bersama

terutama keluarga,” ungkapnya usai mengunjungi Unit Pelayanan Terpadu Daerah Panti Sosial Tresna Werdha (UPTD PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Senin (30/4).

Endang menambahkan, jika kesadaran keluarga dalam menumbuhkan kasih sayang dan perhatian kepada orang tua yang sudah lansia minim, maka secara tidak langsung masalah yang ada pada

lansia itu semakin banyak yang muncul. Entah dari sisi kesehatan, seiring dengan menurunnya usia pasti akan mengalami penurunan dari sisi lainnya.

“Nah ini jadi perhatian kita juga, untuk bagaimana kita mendorong agar lansia itu punya harapan hidup. Anggap saja mereka punya kreatifitas, hatinya senang, dan akhirnya akan mengurangi cost negara dari sisi kesehatan. Karena kalau sudah lansia, mereka senang hidupnya, maka secara tidak langsung cost negara yang digunakan untuk membiayai mereka karena faktor penurunan kesehatan akan semakin berkurang. Ini yang kita harapkan,” papar politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari menyoroti kondisi

Cegah Peredaran Narkoba, Lapas Harus Bebas Alat Telekomunikasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menyarankan agar lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) dibebaskan dari alat telekomunikasi, untuk mencegah peredaran narkoba di sel tahanan. Hal ini seiring maraknya permasalahan lapas atau rutan menjadi tempat peredaran narkoba.

“Petugas lapas atau sipir tidak ada yang membawa HP (handphone, RED), terlebih warga binaan yang memang seharusnya tidak diperkenankan membawa HP di areal lapas,” ungkapnya usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Senin (7/5).

Jika alat komunikasi dilarang digunakan saat berada di lapas, ia meyakini peredaran narkoba dapat dikurangi. Meski demikian, tidak saja faktor alat komunikasi yang menyebabkan peredaran narkoba sulit dibendung.

Selain itu, karena Kalbar adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka penyelesaian sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum dapat dilakukan, seperti juga layaknya penyelesaian overkapasitas lapas.

“Untuk over kapasitas di lapas, itu permasalahan klasik ya. Komisi III



Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap

Foto: Hendra/jk

akan mendorong dan meminta dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, karena ini menyangkut komitmen,” ungkap politisi PAN itu.

Dalam beberapa kasus di negara lain, misalnya di Filipina, dengan status darurat narkoba, maka pengelolaan lapas dikelola secara ketat. ■hs/sf



Tim Kunker Komisi VIII DPR berfoto bersama anak-anak di Unit Pelayanan Terpadu Daerah Panti Sosial Tresna Werdha (UPTD PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin di Sumbang

Foto: Naedia/jk

kelayakan dan keamanan dari kamar mandi di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih tersebut. Mengingat panti ini khusus bagi lansia, maka kamar mandi pun harus didesain khusus atau spesial.

tampung sebuah institusi panti sosial. Menurutnya, kurangnya daya tampung menjadi permasalahan di berbagai daerah sama. Di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin sendiri saat ini dihuni oleh 110

“Spesial dalam artian menghindari mereka terjatuh, menghindari mereka tergelincir. Kan tidak mungkin setiap kali mereka ke kamar mandi, petugasnya selalu mendampingi mereka. Kalau kemudian mereka ternyata bisa, ya Alhamdulillah. Hanya ini harus menjadi perhatian bersama,” sarannya.

Selain itu, Desi juga menyoroti daya

lansia. Menurutnya, ini tentu menjadi PR bersama Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah.

“Bagaimana pemerintah pusat bisa memberikan bantuan alokasi dana. Panti di sini alokasi dananya hanya dari APBD. Nah kalau misalnya dapat bantuan dari pusat, Insya Allah mungkin daya tampungnya akan menjadi lebih besar lagi. Semua orang yang diurus akan lebih besar lagi,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Desi juga menambahkan, yang terpenting adalah bagaimana dengan adanya panti werdha ini, negara bisa memberikan penghargaan kepada warganya yang telah lansia. “Tapi yang jelas, bagaimana kita memberikan penghargaan kepada mereka dan kelayakan kepada mereka, karena mereka adalah juga menjadi bagian dari WNI yang harus dilindungi,” tutupnya. ■ndy/sf



Tim Kunker Komisi IV DPR di Kalimantan Barat

Foto: Ayu/jk

Nelayan Kalbar Minta Komisi IV Desak Pemerintah Cabut Larangan Cantrang

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaiman L. Hamzah kembali meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meninjau ulang kebijakan pelarangan cantrang atau *thrawl*.

Hal tersebut menyusul aspirasi yang disampaikan ratusan nelayan Sungai Pinyu, Kalimantan Barat yang meminta Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI untuk mendesak pemerintah untuk mencabut aturan larangan cantrang. “Sebenarnya sejak peraturan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang atau *thrawl* beberapa tahun lalu itu ada, sudah terjadi penolakan dari nelayan, bahkan mereka juga sempat menyampaikan aspirasi ke Istana Negara. Dan sampai hari ini pun masih terjadi penolakan tersebut oleh para nelayan. Seharusnya pemerintah meninjau ulang

kebijakan tersebut,” ujar Sulaiman saat mengunjungi Sungai Pinyu, Kalbar, Senin (30/4).

Namun ironisnya, tambah Sulaiman, pemerintah malah melakukan diskriminasi dengan hanya mengizinkan nelayan di Pulau Jawa yang boleh menggunakan cantrang. Menurutnya tentu ini bukan aturan yang bijak.

Dilanjutkannya, para nelayan telah puluhan tahun menggunakan cantrang dan selama itu pula tidak ada masalah dengan alam sekitar. Apalagi dengan kekhawatiran kurangnya atau hilangnya ikan-ikan yang ada di laut Indonesia. Sulaeman menilai kekayaan alam

Indonesia berlimpah.

“Itu semua karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketakutan dan kekhawatiran akan hilangnya atau rusaknya ikan-ikan dan biota laut tidak beralasan,” kata politisi Partai NasDem itu.

Oleh karena itu, ia beserta Tim Kunker Komisi IV DPR RI lainnya seperti Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Darori Wonodipuro, Ahmad Yohan, dan Budisatrio Djiwandono meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meninjau ulang kebijakan itu. Demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh nelayan Indonesia pada umumnya. ■ayu/sf

Komisi V Dorong Peremajaan Bandara dan Pelabuhan

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau beberapa infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara. Diantaranya Bandara Naha, pesisir pantai Kampung Likuang Tabukan Utara, dan Pelabuhan Peti Kemas Tahuna, Senin (30/4).

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat memimpin Kunjungan Kerja ini mengatakan, pihaknya sudah mencatat beberapa masukan terkait infrastruktur di Sangehe, salah satunya peremajaan bandara dan pelabuhan.

“Kita dorong untuk melakukan perpanjangan runway Bandara Naha dan akan ditambah menjadi 2000 meter. Tahun 2019 mendatang akan dibangun 200 meter terlebih dahulu. Sisanya 1800 meter akan menyusul,” kata Fary.

Tahun 2017 lalu, lanjut Fary, pihaknya sudah mendorong dan mendukung dana untuk bangunan terminal dan pembangunan pagar bandara. “Memang

masih ada beberapa persoalan untuk membangun pagar, dikarenakan masih ada kebun-kebun masyarakat,” tambahnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya juga sudah melihat dan mendengar keluhan masyarakat di pesisir Pantai Likuang. Masyarakat mengeluhkan kondisi mereka dalam mengamankan rumah tinggal ketika air pasang naik.

“Secara langsung kita sudah melihat dan meminta kepada Balai Sumber Daya Air dan mengusulkan supaya pada 2019 ada perlakuan untuk pantai tersebut. Karena setelah dilihat pantai tersebut dalam keadaan *emergency*. Saya meminta

kepada Bupati Sangehe untuk melakukan koordinasi terhadap penanganan dan paling tidak untuk ditindaklanjuti,” tutur Fary.

Selanjutnya, Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Peti Kemas Tahuna. Kata Fary, untuk pelabuhan sudah ada pengembangan khususnya untuk perpanjangan di tahun 2019 mendatang.

“Dilihat dari persoalannya, apabila ada kapal-kapal yang besar bahkan melebihi dari panjang pelabuhan ini, maka dibutuhkan dukungan anggaran untuk perpanjangan pelabuhan tersebut. Tapi paling penting adalah pengembangan terminal penumpang karena itu merupakan tempat berkumpul,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Sangehe Jabes Gaghana berterima kasih atas kepedulian Komisi V DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur Sangehe. “Semoga bantuan yang disampaikan segera terealisasi,” harapnya. ■soe/sf



Tim Kunker Komisi V DPR meninjau infrastruktur Bandara Naha di Provinsi Sulawesi Utara

Foto: Soe/jk

Sungai Siak Harus Lebih Ditata

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menilai Sungai Siak harus lebih ditata dengan baik agar menarik wisatawan yang berkunjung ke Pekanbaru dan menggunakan transportasi air. Permasalahan seperti abrasi dan tanggul yang rusak harus segera diselesaikan.



Tim Kunker Komisi V DPR meninjau Sungai Siak di Pekanbaru, Riau

Foto: Eno/jk

“Abrasi Sungai Siak harus diselesaikan, bangun tanggul yang baik, perkampungan dan estetikanya juga harus ditata dengan baik, maka itu akan menarik wisatawan. Barulah kita disitu melakukan investasi,” ujar Hamka disela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau Sungai Siak dan Pelabuhan Sungai Duku, Pekanbaru, Riau, Rabu (2/5).

Menurut politisi Partai Golkar itu, saat ini orang cenderung menggunakan transportasi darat dibanding air. Bahkan di Pelabuhan Sungai Duku rata-rata per hari hanya 250 orang yang menggunakan transportasi air. Jadi harus dipikirkan lebih baik perkembangan transportasi air penghubung antar kota ini.

“Jadi kita imbau kepada pemerintah daerah untuk menata sungai ini dulu dengan baik. Apakah dana itu dari APBD atau APBN, silahkan. Kemudian mengatasi abrasi dan sedimentasi di Sungai Siak, karena Pekanbaru objek wisatanya mau ditingkatkan,” imbuh Hamka.

Politisi dapil Sulsel itu menyarankan, yang perlu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai Duku adalah meningkatkan pelayanannya dulu kepada masyarakat yang membutuhkan transportasi air, bukan kepada penambahan fasilitas pelabuhan. ■ eno/sf

Harus Ada Sanksi Tegas Terhadap Perusahaan Pencemar Laut

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mengatakan bahwa masih belum jelasnya sanksi-sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mencemari limbah di sepanjang perairan Kota Batam, Kepulauan Riau. Pasalnya, tumpahan minyak di lautan ini sudah terjadi sepanjang tahun. Menurutnya, hal ini harus disikapi dengan serius.

“Perlu ada jawaban yang serius. Dan saya minta setelah kita kembali ke Jakarta, kita harus rapat membicarakan ini bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena potensi limbahnya itu luar biasa,” ungkap Mukhtar setelah pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan pihak terkait di Kantor Gubernur Kepri, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (30/4).

Diketahui, baru-baru ini limbah minyak (oil spill) mencemari sejumlah titik pantai di Nongsa, Batam. Di antaranya pantai kawasan wisata dan resort (penginapan mewah) Turi Beach dan Nongsa Village. Namun ternyata Kawasan pesisir Batam dan Bintan selalu tercemar tumpahan minyak sejak tahun 2015, yang salah satu penyebabnya diduga pembuangan limbah minyak secara ilegal.

Menurut data dari KLHK, angkanya mencapai 200 drum limbah yang diangkut jika di kalikan sepanjang lima

bulan sudah ada 1000 drum, itu baru dari KLHK. Belum lagi Provinsi Kepri sudah mengangkut sekitar 30 drum. Dari informasi yang ada juga bahwa perairan Batam ini lautnya sudah tidak lagi biru, tetapi sudah hitam-hitam dan itu terjadi laten setiap tahun, selama lima bulan berturut turut dalam satu tahun berjalan. Itu persoalan yang sangat serius di depan mata.

“Ini seolah-olah ada pembiaran yang terjadi. Untuk angkanya limbah itu mencapai 200 drum untuk KLHK, dan 30 drum untuk provinsi. Itu pun masih tidak jelas apakah itu tiap bulan sepanjang lima bulan dalam tahun berjalan ataukah itu angka dalam akumulasi satu tahunan lima bulan itu. Jika perbulan dimulai dari bulan Oktober sampai Februari, berarti ada lima bulan jika dikalikan dengan limbah yang diangkut oleh KLHK saja 200 drum, berarti

Legislator Apresiasi PT. Timah Perbaiki Lingkungan Alam

Anggota Komisi VII DPR RI Eko Wijaya memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan PT. Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dalam memperbaiki kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan timah.



Foto: Dep/jk

Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau areal pasca tambang air Jangkang di Pangkal Pinang, Provinsi Babel

“ Saya memberikan apresiasi kepada PT. Timah atas upaya reklamasi areal pasca tambang air Jangkang yang telah dilakukannya,” ujar Eko Wijaya usai meninjau areal pasca tambang air Jangkang di Pangkal Pinang, Provinsi Babel, Senin (30/4).

Politisi Partai Demokrat itu berharap agar ke depannya Provinsi Babel tidak lagi dikenal dengan banyaknya lubang bekas areal tambang. “Ke depan, saya berharap perusahaan-perusahaan swasta lainnya juga dapat ikut melakukan reklamasi,” imbuhnya.

Eko menjelaskan, kehadiran Tim Kunker Komisi VII DPR di Babel adalah untuk mendengarkan aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Babel. Apalagi, perekonomian di Babel masih bergantung pada sektor pertambangan.

“Dengan diperketatnya aturan perundang-undangannya, maka diharapkan jumlah penambang liar di Babel semakin berkurang jauh. Komisi VII akan terus mendorong agar dilakukan reklamasi terhadap semua bekas arel tambang yang terdapat di seluruh wilayah Tanah Air,” ucap politisi dapil Babel itu.

■ dep/sf

akan ada 1000 drum,” beber Mukhtar.

Menurut politisi Partai Hanura itu, penanganannya masih belum jelas. Ia melihat hanya ada perebutan limbah untuk dibawa ke perusahaan pengolahan limbah yang ada di Provinsi Kepri dan tidak mencantumkan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam kaitan penanganan limbah dan pencegahannya. Mukhtar menilai seperti ada pembiaran yang terjadi. Ia melihat penanganan ini tak seperti tumpahan minyak Balikpapan yang terjadi dalam satu waktu, namun kemudian itu disikapi dengan serius.

“Ini terjadi setiap tahun dan bahayanya itu mungkin tidak terjadi jatuh korban jiwa secara langsung. Tetapi dampaknya nanti luar biasa, bagaimana dengan kita yang makan makanan hasil laut, bagaimana dengan ibu hamil dan anak-anak yang mengkonsumsi makanan laut yang tercemar limbah. Kita belum tahu juga bagaimana hasil penelitian lingkungan laut biota lautnya rusak sampai di mana kerusakannya,” kritisi Mukhtar. ■ azk/sf



Foto: Azka/jk

Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo

Panti Sosial Himo-Himo Ternate Butuh Mobil Operasional dan Ambulance



Foto: Ojiz/jk

Tim Kunker Komisi VIII DPR meninjau Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo Ternate di Provinsi Maluku Utara

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily berkomitmen akan meneruskan aspirasi dari Panti Sosial Himo-Himo Ternate, Maluku Utara, terkait perlunya mobil ambulance dan kendaraan operasional untuk reaksi cepat menangani persoalan kesehatan para lanjut usia (lansia) kepada Kementerian Sosial.

Hal tersebut diungkapkan saat dirinya memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI mengunjungi Panti sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Himo-Himo Ternate didampingi Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Andrias Thomas dan Kepala Panti Sosial Samiun Usman di Ternate, Maluku Utara, Senin (30/4).

“Negara wajib hadir untuk membantu dan memperhatikan orang-orang lanjut usia. Saya melihat panti sosial di sini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kami berkomitmen untuk menyampaikan semua aspirasi ke pemerintah pusat agar segera direspon,” ujar Ace dalam sambutannya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengapresiasi kondisi lingkungan panti sosial yang berdiri sejak 1982 itu, nampak bersih dan terawat. Hal tersebut penting untuk menjaga kesehatan para lansia yang tinggal di sini.

“Panti sosial Himo-Himo Ternate ternyata juga belum mendapatkan anggaran dari APBN, baru sebatas

Sarana Laboratorium SMA di Manokwari Belum Mumpuni

Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad menegaskan, agar sarana laboratorium IPA di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Manokwari, Papua Barat, harus diperbaiki sesuai standar. Karena hasil tinjauan langsung Komisi X DPR RI ke SMAN 2 Manokwari didapati laboratorium sekolah belum mumpuni. Menurutnya, peralatan pendidikan, seperti laboratorium adalah sarana mutlak yang harus dipenuhi.

“Mata pelajaran IPA akan lebih mudah dipahami dengan simulasi praktik di laboratorium. Laboratorium IPA itu masih sangat minim sekali, bahkan bahan-bahannya tidak ada. Mereka harus bekerja sama dengan Universitas Papua (UNIPA). Oleh karena itu, kami berharap agar alat-alat laboratorium bisa diperbanyak di sini,” papar Noor saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat,

Senin (30/4).

Politisi Partai Golkar ini juga mengkritisi soal pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Catatan saya yang memang perlu diketahui oleh publik terutama Kemendikbud, pertama bahwa UNBK di sini meskipun bisa berjalan dengan baik, server-nya masih kurang dan listriknya kadang-kadang padam,” imbuh Noor.

Padahal menurutnya SMAN 2 Manokwari ini termasuk SMA yang dinilai paling maju dibanding lainnya yang ada di daerah setempat, tapi masih ada kekuarangan sarana prasarana mengajar. “Maka dari itu, ini harus menjadi afirmasi dari Kemendikbud, agar ketertinggalan SMA yang ada di Papua Barat ini bisa sejajar dengan SMA yang lain yang sudah maju,” harap Noor.

Menurutnya, konsekuensi dari ketertinggalan ini harus ada toleransi bagi pelajar di Papua Barat dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi ternama. “Harus ada toleransi bagi yang akan masuk perguruan tinggi, karena dari SMA-nya saja sudah kurang,” harap Noor.

Kemudian persoalan guru di Manokwari, di daerah ini juga masih banyak guru yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlebih lagi tugas guru dan laboran (guru praktik di laboratorium,



APBD untuk biaya operasional. Kami harapkan Kepala Dinas terkait untuk memperjuangkannya agar ke depannya bisa memperoleh APBN,” dorong Ace.

Dalam tinjauan tersebut, legislator asal Banten ini juga menyampaikan rasa haru atas sambutan tarian tradisional para lansia yang usianya rata-rata diatas 60 tahun.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Andrias Thomas dalam sambutannya memaparkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2017 sebesar 6,44 persen. Menurutnya, diperlukan dukungan APBN untuk menekan pertumbuhan angka kemiskinan.

Dalam kesempatan sama, Kepala Panti Sosial Himo-Himo Ternate Samiun Usman berharap kehadiran Tim Kunker Komisi VIII DPR RI bisa membantu merealisasikan mobil *ambulance* dan kendaraan operasional untuk melayani para lansia di panti jika terjadi kondisi darurat kesehatan.

Diakhir kunjungan, Anggota Tim Kunker Komisi VIII DPR RI secara simbolis menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial untuk para lansia di panti rehabilitasi sosial Himo-Himo Ternate. ■

ojs/sf



Tim Kunker Komisi X DPR meninjau sejumlah sarana dan prasarana SMA di Manokwari

Foto: Eko/jk

RED) tidak dipisahkan, ini menyebabkan ketidakprofesionalan pembagian kerja.

“Gurunya masih sangat minim, banyak guru yang bukan ASN. Bahkan tadi banyak guru yang merangkap menjadi laboran. Ini tidak boleh, seharusnya seorang guru ya guru. Laboran ya laboran. Dengan demikian mereka bisa konsentrasi untuk menata laboratoriumnya,” tutup politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ eko/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus

Foto: Singgih/jk

Komisi V Akan Perjuangkan Kebutuhan Basarnas Kalbar

Kebutuhan personel dan peralatan Badan SAR Nasional (Basarnas) Kalimantan Barat menjadi fokus perhatian Komisi V DPR RI Pasalnya, wilayah geografis Kalimantan Barat begitu luas dan merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga, maka sangat diperlukan personel dan peralatan yang memadai.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kalimantan

Barat ini berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari pihak Basarnas atas kekurangan personel dan peralatan serta rencana pembentukan pos di Kabupaten Sintang.

“Saya termasuk yang memperjuangkan supaya ada kantor SAR di Sintang, karena jangkauan dari Kota Pontianak ke daratan pulau Kalimantan Barat sangat jauh,” ungkapnya disela-sela kunjungan ke Kalbar, Senin (30/4).

Lasarus menambahkan, tenaga SAR memanglah harus menyebar dititik tertentu, hingga terjangkau pada masyarakat yang membutuhkan, sehingga kecepatan dan ketepatan sampai ke lokasi yang membutuhkan pertolongan bisa cepat dan terukur.

Ia menegaskan juga bahwa yang perlu diperhatikan Basarnas dalam memberikan pertolongan adalah ketepatan waktunya, sehingga personel, peralatan sangat penting bagi mereka.

“Saya berpandangan bahwa

tenaga SAR harus menyebar dititik-titik tertentu, sehingga jangkauan ke kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Kalimantan Barat tidak membutuhkan waktu lama,” jelas politis PDI Perjuangan itu.

“Tugas utama SAR itukan bagaimana mereka bisa sampai di tempat kecelakaan secepat mungkin, sehingga bisa melakukan pertolongan utama menyelamatkan apabila yang masih bisa diselamatkan,” imbuh Lasarus.

Menurutnya, jika patokannya dari Kota Pontianak, menjadi tidak logis apalagi fasilitas dan jumlah personel sangat terbatas, sehingga menjadi konsen untuk setiap tahun adanya penambahan yang pantas dan wajar. Harapannya Basarnas bisa melaksanakan tugasnya serta mengawal seluruh daratan dan pantai yang ada di Kalbar, manakala ada bencana atau kecelakaan bisa bertindak dengan cepat di lokasi kejadian.

Politisi dapil Kalbar itu juga meminta agar Basarnas segera mengajukan kebutuhan personel dan peralatan kepada pemerintah pusat, sehingga nanti bisa dialokasikan dalam APBN.

■ skr/sf



Foto: Iwan/jk

Tim Kunker Komisi IX DPR meninjau RSUD dr. H. Marsidi Judono di Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Babel

Komisi IX Soroti Tenaga Medis RSUD Marsidi Judono Belitung

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI menyoroti ketersediaan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Marsidi Judono, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

“Ketersediaan tenaga medis secara umum sebetulnya diupayakan perlahan untuk bisa dilengkapi, khususnya RSUD di Belitung ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Dauly saat memimpin Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau RSUD dr. H. Marsidi Judono di Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Babel, Rabu (2/5).

Politisi PAN itu berharap, terhadap permasalahan ini nantinya ada solusi dari pemerintah pusat, sehingga ada tenaga medis yang dikirim untuk melengkapi kekurangan itu. Dalam peninjauan juga terungkap bahwa RSUD dr. H. Marsidi Judono dijadikan

rumah sakit rujukan regional.

“Ada beberapa rumah sakit kabupaten menjadikan RSUD di Belitung ini sebagai rujukan utamanya. Sehingga RSUD Belitung menjadi benteng pertahanan terakhir sebelum dipindahkan ke tempat lain,” ungkap Saleh.

Ia juga menyoroti pentingnya memaksimalkan pusat kesehatan masyarakat, terutama dalam memberikan pendidikan kesehatan. “Misalnya masih adanya persoalan *stunting* dan itu sangat tidak baik bagi generasi yang akan datang,” imbuh Saleh.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Marsidi Judono Belitung Hendra menilai, Tim Kunker Komisi IX DPR RI puas dengan

kondisi RSUD yang dipimpinnya, setelah meninjau beberapa fasilitas dan ruangan. Karena RSUD Belitung sudah dilengkapi sarana dan prasarana (sarpras) dan alat kesehatan (alkes) yang cukup memadai.

Ia menambahkan, selama ini untuk melengkapi sarpras dan alkes di RSUD Belitung, pihaknya selalu mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam kesempatan itu, Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau beberapa fasilitas diantaranya ruang Pendaftaran, Poliklinik, ICU, Perinatologi, UGD, ruang perawatan inap kelas tiga dan ruangan CT Scan. ■ iw

Komisi IX Minta Peralatan RS Pratama Ende Disegerakan



Foto: Suci/jk

Tim Kunker Komisi IX DPR menerima cenderamata dari Pemkab Ende di Rumah Dinas Bupati Ende, NTT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena meminta kepada Kementerian Kesehatan RI agar peralatan serta sarana dan prasarana Rumah Sakit Pratama di wilayah utara Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk disegerakan.

“Komisi IX DPR berkomitmen untuk menyegerakan peralatan serta tenaga kesehatan yang akan menjadi petugas di Rumah Sakit Pratama Ende,” kata Ermalena menjawab permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende yang disampaikan Asisten I Pemkab Ende, saat pertemuan Tim Komisi IX DPR dengan jajaran Pemkab Ende, di Rumah Dinas Bupati Ende, NTT, Jumat (4/5).

Menurut Ermalena, seluruh pihak harus bersama-sama memajukan daerah wisata, salah satunya Kabupaten Ende ini. “Kalau seandainya rumah sakit itu sudah ada, kita bisa bangga dan kita yakin mempromosikan wisata kita,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Ende terdapat destinasi wisata unggulan yaitu Taman Nasional Danau Kelimutu yang banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara. Oleh karenanya, sambung politisi PPP ini, sangatlah tepat apabila

untuk menunjang promosi wisata ini pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari promosi wisata dan menjadi prioritas.

“Jangan sampai kita memaksimalkan promosi wisata, namun kita tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada wisatawan yang datang ke Ende. Tidak

Dibangun di sana, karena di sana ada 5 kecamatan yang kalau pasiennya dirujuk ke Ende dengan topografi yang sulit, biasanya pasien tidak sampai ke Ende. Ibu yang akan melahirkan bisa melahirkan di jalan. Kalau pasien sakit berat, biasanya meninggal di daerah itu

elok rasanya ketika ada wisatawan darurat dan membutuhkan pelayanan kesehatan, kita malah melakukan evakuasi ke Kupang atau Bali,” paparnya.

Tentunya hal ini, tegas legislator dapil NTB ini, merupakan sesuatu yang tidak baik bagi promosi wisata. Kepada Staf Ahli Menteri Kesehatan yang mendampingi Tim Komisi IX ke Ende, Erma mengharapkan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan. “Atas permintaan Komisi IX DPR, peralatan RS Pratama di Ende untuk di segerakan,” tegasnya.

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Asisten I Pemkab Ende Kornelis Wara menyampaikan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan Ende, dengan misi utama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada tahun 2017, Pemkab Ende telah membangun sebuah RS Pratama yang berada di wilayah utara Kabupaten Ende, berjarak 70 km dari pusat Kabupaten Ende. “Dibangun di sana, karena di sana ada 5 kecamatan yang kalau pasiennya dirujuk ke Ende dengan topografi yang sulit, biasanya pasien tidak sampai ke Ende. Ibu yang akan melahirkan bisa melahirkan di jalan. Kalau pasien sakit berat, biasanya meninggal di daerah itu,” terangnya.

Berangkat dari pengalaman tersebut, pada 2017 Pemkab Ende membangun sebuah RS Pratama dan dilanjutkan tahun ini. Tapi masih banyak perlu perhatian, yaitu alat kesehatan RS dan sarana prasarana lainnya, seperti rumah dinas para medis yang bertugas di sana.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengakui bahwa pelayanan kesehatan belum berjalan optimal mengingat topografi wilayah Ende yang berbukit-bukit, mengakibatkan belum semua wilayah terjangkau pelayanan kesehatan.

“Oleh karena itu, kehadiran Komisi IX DPR merupakan sejarah bagi kami, terutama dukungan dan perhatian untuk menunjang pembangunan RS Pratama termasuk fasilitas-fasilitas pendukungnya, serta sarana prasarana kesehatan lainnya,” harapnya. ■ sc/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Foto: Ria/od

Pendidikan Karakter Harus Ditingkatkan

Pendidikan Karakter perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan siswa dan siswi yang kaya akan kreativitas dan inovasi dalam karya-karya yang bermanfaat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin (30/4).

“Kami melihat kreativitas serta inovasi siswa di Tanjung Pinang cukup baik. Ini menunjukkan pendidikan karakter yang diusung Kemendikbud berjalan sesuai dengan tujuan,” ungkap Sutan.

Dijelaskan Sutan, siswa SMAN 4 Tanjung Pinang dengan kreatif membuat karya berupa alat daur ulang plastik yang bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Ia menilai, inovasi yang dilakukan siswa itu karena sekolah di Tanjung Pinang itu sudah menerapkan pendidikan karakter dengan cukup baik.

“Ini yang harus didorong, bagaimana siswa bisa terus berkarya dan menjadi *entrepreneurship* sejati,” harap politisi Partai Gerindra itu.

Selain itu, persoalan yang cukup menjadi perhatian Sutan adalah masih banyak tenaga pengajar berstatus honorer yang diberdayakan. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya membahas hal ini ke kementerian terkait, agar ke depan tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami akan berupaya mendiskusikan ini ke Kementerian terkait,” ujar politisi daerah pemilihan Jambi itu.

Dijelaskan Sutan, Komisi X DPR telah membentuk Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari hasil Panja, ditemukan ada banyak kendala dalam pencapaian standar, yaitu standar sarana prasarana, standar pendidik dan

tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, dan standar pengelolaan.

Permasalahan dalam pencapaian standar sarana dan prasarana, tercatat data bahwa dari 1.833.000 ruang kelas di seluruh Indonesia, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (hanya 26 persen), dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan.

Sementara, untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, masalah utama adalah kekurangan guru untuk mengisi guru yang akan pensiun pada 2018-2021 sebanyak 256.950 guru. Di sisi lain, permasalahan guru honorer yang mengajar di sekolah menurut data Kemendikbud sebanyak 736 ribu guru juga

Dana APBD provinsi untuk pendidikan menengah dikhawatirkan tidak mencukupi untuk menutupi penyelenggaraan pendidikan menengah

harus segera diselesaikan.

Sutan menambahkan, pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga berdampak pada standar pengelolaan di satuan pendidikan, utamanya terkait kualitas guru dan pembiayaan pendidikan.

“Pemindahan status ASN dari pegawai kabupaten dan kota menjadi pegawai provinsi membutuhkan koordinasi yang baik dan waktu yang sesuai. Rentang kendali yang cukup panjang dari kabupaten dan kota ke provinsi dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan lanjutan atau dampak yang merugikan pegawai, baik dari sisi kompetensi maupun psikologi,” jelasnya.

Persoalan lainnya adalah posisi guru bantu. Persoalan guru bantu yang digaji APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota harus segera diselesaikan, sebab pengangkatan mereka sebagai guru bantu merupakan kebijakan sementara untuk memenuhi kekurangan guru yang berstatus PNS. Hal yang sama juga terjadi pada guru honorer. Kepastian hal ini apabila tidak dapat diselesaikan tentu akan mempengaruhi proses pembelajaran.

“Dana APBD provinsi untuk pendidikan menengah dikhawatirkan tidak mencukupi untuk menutupi penyelenggaraan pendidikan menengah, sehingga dimungkinkan ada penarikan biaya ke murid-murid SMA dan SMK. Dampak lanjutannya adalah kenaikan angka putus sekolah,” tuturnya.

Memperhatikan berbagai hal tersebut, pendidikan perlu mendapat perhatian serius, seksama, dan kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Apalagi, anggaran pendidikan cukup besar. Untuk tahun 2018, mencapai 20 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.204 triliun, yaitu sebesar Rp441 triliun. Bahkan, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir tidak kurang dari Rp3.500 triliun untuk anggaran pendidikan. ■ rnm/sf

Komisi III Serap Aspirasi Mitra Kerja di Sultra

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara guna melakukan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi. Selain itu, kunker ke Sultra juga meninjau sekaligus berdialog dengan mitra kerja Komisi III DPR RI untuk mendapatkan masukan tentang permasalahan bidang kerja komisi hukum ini.

Tiba di Kendari, Senin (7/5) Tim Kunker Komisi III DPR RI langsung meninjau Lapas Kelas IIA Kendari. Kegiatan dilanjutkan pertemuan dengan Kapolda Sultra, Kakanwil Kemenkumham Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala BNNP Sultra dan tiga lingkungan peradilan se-wilayah Sultra.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto memaparkan, sejumlah kerawanan konflik terjadi di Sultra, salah satunya akibat adanya kegiatan pertambangan. Potensi konflik itu terjadi ketika izin tambang di suatu wilayah bersinggungan dengan tanah masyarakat.

Hal ini dapat memicu konflik, karena perusahaan pertambangan berpegang pada izin, sementara masyarakat sudah lama memiliki tanah di lokasi tambang itu. “Namun demikian, potensi konflik itu sampai sekarang bisa kita kelola dengan baik, sehingga tidak menjadi hambatan yang signifikan,” jelas Iriyanto.

Tim Kunker Komisi III DPR RI dipimpin Ichsan Soelistio (F-PDI Perjuangan) didampingi Herman Herry (F-PDI Perjuangan), Saiful Bahri Ruray (F-Golkar), John Kenedy Azis (F-Golkar), Adies Kadir (F-Golkar), dan Bambang Heri Purnama (F-Golkar).

Kemudian, Moreno Soeprapto (F-Gerindra), Hinca Pandjaitan (F-Demokrat), Yosef B. Badeoda (F-Demokrat), Jazilul Fawaid (F-PKB), Mohammad Toha (F-PKB), Akbar Faizal (F-NasDem), Dossy Islandar Prasetyo (F-Hanura). ■ hr/sf



Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sultra, Kakanwil Kemenkumham Sultra Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala BNNP Sultra

Foto: Eka Hindra/oc

Bea Cukai Bali Harus Waspada Masuknya Obat-obatan Terlarang

Keberhasilan yang sudah berjalan selama ini harus lebih ditingkatkan lagi.



Foto: Chasbi/od

Tim Kunker Komisi XI DPR RI menerima cenderamata dari Kepala Kantor Bea dan Cukai Bali

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan, Bea Cukai Bali harus waspada terhadap masuknya obat-obatan terlarang melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Teluk Benoa. Pasalnya pada bulan Oktober yang akan datang, Bali akan menjadi tuan rumah dalam IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

“ Karena pintu masuknya obat-obatan terlarang tersebut melalui wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, agar kita harus

waspada terhadap hal ini,” katanya disela-sela Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Kantor Bea dan Cukai, Bali, Senin, (30/4). Politisi PDI-Perjuangan itu

memaparkan, bukan hanya Bandara Ngurah Rai saja, tapi Teluk Benoa juga perlu diperketat pengamanannya. Karena Bea dan Cukai pernah mendapatkan obat-obatan terlarang diselundupkan ke Bali, dengan cara dimasukkan ke dalam anus dan alat vital perempuan.

“Bea dan Cukai Bali sudah banyak sekali mendapatkan temuan-temuan lainnya. Kemarin ada kendaraan-kendaraan impor yang tidak memenuhi persyaratan administrasinya, sehingga harus ditahan di kantor pusat. Narkoba, obat-obatan terlarang dan juga barang-barang yang memang tidak seharusnya masuk ke Indonesia, semaksimal mungkin diberlakukan hal seperti itu,” tambahnya.

Politisi dapil Bali ini mengatakan, banyak sekali temuan-temuan yang tidak terungkap. Jangan sampai penyebaran ini menjadi masif. Ia pun mengapresiasi Bea dan Cukai yang sudah bekerja sama dengan BNNP Bali dan Polda Bali, guna mengantisipasi peredaran obat-obatan terlarang tersebut.

“Keberhasilan yang sudah berjalan selama ini harus lebih ditingkatkan lagi. Karena ini semua sudah mencapai hasil yang bagus, akan lebih baik untuk ditingkatkan lagi. Jika diperlukan sarana dan prasarana lainnya demi mendukung hal tersebut, kami akan komunikasikan dalam pembahasan-pembahasan anggaran,” tutupnya. ■ cas/sf

SDM Pariwisata Kalteng Perlu Diperkuat

Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata sangat urgen dan strategis untuk terus diperkuat. Untuk itu, pendidikan vokasi kepariwisataan perlu diadakan di semua daerah terutama yang menyimpan potensi wisata menarik. Dengan begitu, objek wisata bisa terus terpelihara dan tergal dengan baik.



Foto: Husen/jk

Tim Kunker Komisi X DPR meninjau sarpras SMK Negeri 3 Kalimantan Tengah

Komisi VII Prihatin Meledaknya Sumur Minyak Aceh Timur

Komisi VII DPR RI menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam terhadap insiden meledaknya sumur minyak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Pasalnya, akibat terjadinya insiden pada akhir April 2018 itu, telah merenggut 23 nyawa, dan 35 orang menjalani perawatan intensif. Perlu diselidiki penyebab dari insiden itu, agar ke depannya ada langkah antisipasi, sehingga tidak terjadi lagi.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menggelar pertemuan dengan Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, PT Pertamina, PT PLN, PT Inalum, BPH Migas, PT PGN, Kementerian Ristek dan Dikti RI, di Medan, Sumatera Utara, baru-baru ini.

“Kami merasa miris dengan kejadian minyak tumpah di Balikpapan beberapa waktu yang lalu, karena ada korban jiwa lima orang. Ternyata ada lagi kejadian sumur minyak meledak di Aceh Timur,



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu

Foto: Rizka/od

bahkan korban jiwa sampai 23 orang. Untuk itulah, kami merasa penting untuk mengetahui apa penyebabnya. Ini untuk kemudian mendorong agar ada jalan keluar, dan peristiwa seperti itu tidak terulang kembali di seluruh wilayah Indonesia,” kata Gus Irawan.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dari penjelasan PT. Pertamina, diketahui sumur minyak ini berkategori ilegal. Namun, negara harus tetap hadir, dan harus mencari solusi supaya kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, jatuhnya korban sebanyak 23 korban merupakan pembelajaran, sehingga semua pihak perlu untuk berkontribusi, supaya hal itu tidak terjadi lagi.

Selain itu, dari paparan PT. Pertamina itu juga diketahui, banyak *illegal*

drilling atau *illegal mining* terjadi pada sumur-sumur tua maupun daerah wilayah yang sudah tidak ekonomis bagi PT. Pertamina. Namun kemudian sumur tua dikelola oleh masyarakat.

“Dari apa yang disampaikan Pertamina, ini memang sudah terorganisir pelaku utamanya. Kami menduga, ini pasti ada *back up* dari aparat. Maka dari itu, mari kita ambil pelajaran yang seperti, ini jangan ada oknum yang melindungi. Saya kira *law enforcement* perlu untuk ditegakkan, supaya peristiwa seperti ini tidak terulang lagi,” imbuh Gus Irawan.

Ia mengatakan, kegiatan *illegal drilling* tidak hanya terjadi di Aceh, melainkan juga di beberapa lokasi antara lain di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lebih lanjut ia mengatakan, Pertamina harus secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, dan pemda setempat untuk membahas investigasi dan kelanjutan penanggulangan insiden.

“Kami mengapresiasi seluruh pihak dalam penanganan insiden kebakaran ini. Diharapkan kita semua dapat mengambil pelajaran terkait bahaya dan risiko kegiatan *illegal drilling*. Kami mengimbau agar masyarakat tidak mendekati dan tidak melakukan aktivitas berbahaya seperti menyalakan api di dalam radius zona aman, yaitu sekitar 110 meter,” pesan politisi dapil Sumut itu.

Diketahui, Pertamina juga telah membentuk Pusat Komando dan Pengendalian di kantor pusat serta menurunkan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) untuk dapat membantu proses penanganan dan memonitor perkembangan insiden kebakaran tersebut. Pertamina juga sudah turun ke lokasi dan telah membuat tanggul serta kolam di lokasi untuk menampung cairan.

Insiden terbakarnya sumur minyak ilegal yang terjadi di Desa Pasir Putih, Rantau Peureulak, Aceh Timur, pada Rabu (25/4) lalu telah diatasi. PT Pertamina mengatakan tragedi kebakaran itu terjadi akibat kegiatan penambangan liar (*illegal drilling*) pada sumur di halaman rumah warga yang berada di sekitar wilayah operasi KSO (Kerja Sama Operasi) PT Aceh Timur Kawai Energy. *Illegal drilling* itu tidak memperhatikan prosedur keselamatan pemboran migas yang baik dan benar. ■ran/sf

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien mengemukakan hal itu kepada Parlemen saat meninjau SMK Negeri 3 Kalimantan Tengah, yang membuka pendidikan kepariwisataan, di Palangka Raya, Selasa (1/5). Tidak semua daerah punya sekolah pariwisata. Bahkan, di Kalteng belum ada pendidikan tinggi kepariwisataan. Akhirnya, banyak pemandu wisata dari daerah lain masuk ke Kalteng.

Menurut Hetifah, sulit membatasi pemandu wisata dari daerah lain masuk ke Kalteng. Sekarang tinggal bagaimana kehadiran pemandu wisata dari luar Kalteng bisa melakukan alih pengetahuan dan teknologi kepada SDM pariwisata setempat. Dan para siswa SMK ini bisa menjadi jembatan untuk mengoptimalkan

peran pemandu wisata sekaligus menggali potensi wisata lokal.

“Tidak semua daerah punya sekolah khusus pariwisata. Tidak menutup kemungkinan di Kalteng ada pendidikan tinggi pariwisata. Sekarang tinggal SDM-nya. Bukan saja jadi *tour guide* (pemandu wisata, RED) biasa, tapi juga penguasaan bahasa dan keterampilan khusus harus dikuasai, seperti menyelam,” ujar Anggota F-PG DPR ini.

Dikatakan Hetifah, potensi pariwisata Kalimantan bisa menjadi alternatif selain Bali. Kalimantan kaya dengan biota laut. Untuk itu, infrastruktur pariwisata Kalimantan perlu dibenahi. Transportasi, hotel, dan fasilitas lainnya harus memadai, agar akses pariwisata Kalimantan begitu mudah dan murah. ■mh/sf



Kunjungan benchmarking Analisis Media Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI ke Biro Humas dan Protokol Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Analisis Media Menjadi Barometer Efektivitas Pemberitaan

DPR RI melakukan transformasi untuk mewujudkan parlemen modern yang didukung oleh unsur transparansi, keterwakilan dan penggunaan teknologi, khususnya keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memastikan kegiatan DPR RI dalam menjalankan fungsinya terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

Hadirnya analisis media dapat menjadi barometer efektivitas suatu pemberitaan. Mengingat, analisis media merupakan suatu reaksi dari realita yang ada dalam masyarakat dan tercermin melalui pemberitaan media melalui analisa *framing* agar dapat memberikan pemahaman terhadap sebuah konten

berita.

Demikian mengemuka dalam kunjungan *benchmarking* Analisis Media Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Senin (7/5).

Diskusi dibuka oleh Kepala Sub Bagian Peliputan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ismulyadi didampingi Kabag Pemberitaan Ismunandar Eka Saputra dan Kabag Dokumentasi Seridana. Serta dihadiri oleh pejabat dan staf Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR.

Dalam kesempatan itu, Kepala Sub Bagian Media Cetak Setjen DPR RI Sugeng Irianto mengatakan, DPR RI secara bertahap terus menata diri untuk mewujudkan visinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern dan berwibawa.

Salah satunya adalah memastikan seluruh kegiatan kedewanan dapat tersosialisasikan dengan baik. Hadirnya analisis media menjadi penting dalam menentukan media *coverage* serta mengamati isu-isu aktual yang berpotensi mempengaruhi citra.

Senada, Kepala Sub Bagian Analisis Media Setjen DPR RI Ahyar Tibi mengatakan, membangun citra adalah salah satu tantangan dalam analisis



Foto: Kiki/od

media. Sebab, menurut Ahyar, masih banyak kegiatan kedewanan yang belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, sangat tergantung dari sudut pandang *media cover* masing-masing media. Artinya, *tone* terhadap pemberitaan maupun isu aktual menjadi penting.

“Kajian analisis media dijadikan dasar memberi solusi terhadap *tone* isu pemberitaan, bahkan mengubah *tonedari* negatif menjadi positif,” kata Ahyar.

Sementara itu, Ismulyadi turut mengungkapkan sejumlah hal yang dilakukan dalam membangun citra positif di tengah-tengah pemberitaan berkonten negatif di media *mainstream*.

“Diantaranya mengadakan pertemuan secara berkala dengan menghadirkan narasumber dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan juga tentunya membangun hubungan baik dengan para wartawan seperti melibet dan mengikutsertakan wartawan dalam kegiatan dengan Gubernur,” ungkap Ismulyadi. ■ [ann,tra/sf](#)



Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk

Kondisi Hukum Hampir Kehilangan Rohnya

Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini banyak mendapatkan *judicial review* serta di daerah juga banyak peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kondisi hukum terutama beberapa undang-undang dan peraturan daerah, hampir kehilangan rohnya. Isi serta nilai kebangsaan dalam praktek peraturan tumpang tindih dan pengabaian terhadap prinsip hierarki ideologi Pancasila mewarnai peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melakukan diskusi Pra Simposium dengan tema ‘Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan’. Diskusi ini membahas ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus secara normatif dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Kegiatan ini sebagai langkah untuk merespon kebutuhan pembenahan sistem peraturan perundang-undangan yang saat ini dinilai kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya gugatan atau *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk, saat membuka Pra Simposium ini, di Hotel Grand Zuri, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (2/5).

Johnson menambahkan, sebagai konsekuensi, seharusnya energi dan komitmen negara diarahkan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi upaya mensejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya, menimbulkan beban dan penderitaan bagi masyarakat. “Hukum harus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat,” katanya.

Johnson berharap rangkaian pra simposium dan simposium yang nantinya akan dilaksanakan, menjadi kesempatan untuk melakukan beberapa hal, yaitu menggali konsep-konsep sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mengevaluasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap bidang kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Serta merumuskan tolak ukur penenerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai instrumen dan batu uji penerapan nilai-nilai Pancasila pada setiap norma peraturan perundang-undangan.

“Instrumen ini diharapkan dapat digunakan oleh siapapun yang terlibat dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu, dalam kegiatan pra simposium dan simposium ini juga diharapkan dapat dirumuskan mekanisme dan kelembagaan yang terkait pengujian atau preview terhadap usulan peraturan perundang-undangan baik terhadap naskah akademik maupun RUU sebelum disetujui atau disahkan menjadi UU,” tutup Johnson. ■ [as/sf](#)



Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih H. Amro

Foto: Nita/oc

Komisi IV Dorong Sumsel Tingkatkan Budi Daya Ikan Air Tawar

Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih H. Amro mendorong dan memberikan motivasi kepada nelayan di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk meningkatkan budi daya di air tawar. Selain untuk konsumsi langsung oleh masyarakat, hasil budi daya ikan juga dapat digunakan untuk membuat makanan khas Sumsel, yaitu pempek.

“Menurut saya, potensi perikanan ini disamping untuk konsumsi oleh masyarakat Sumsel, juga dapat dibuat makanan khas pempek di Kota Palembang. Apalagi pempek itu kebutuhannya kurang lebih 6,7 juta ton per bulan,” kata Fauzih di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sumsel, baru-baru ini.

Oleh sebab itu, tambah politisi Partai Hanura itu, dengan besarnya potensi dan permintaan akan hasil budi daya ikan, ia mendorong Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) untuk terus melakukan intervensi kebijakan dalam rangka peningkatan sumber daya perikanan air tawar yang ada di Sumsel.

Namun tak dipungkiri, minat untuk membudidayakan itu juga masih ada kekurangan, khususnya untuk budi daya ikan gabus. Bahkan untuk komoditas ikan gabus, Sumsel masih mendapat pasokan dari daerah lain. Kebutuhan ikan gabus utamanya untuk konsumsi dan bahan pembuatan pempek.

“Oleh sebab itu, kepada *stakeholder*

kelompok tani dan nelayan, kita berharap budi daya gabus ini bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal ini agar bisa memenuhi konsumsi pasar, baik di Sumsel, maupun di luar Sumsel,” tandas Fauzih.

Masalah sarana prasarana juga menjadi sorotan Fauzih. Menurutnya, untuk kampung nelayan di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, perlu adanya peningkatan sarana prasarana, seperti pasar moderen, pusat kuliner, pasar ikan, dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

“Nah Sumsang ini tempat penampung ikan yang sangat luar biasa. Cuma jalan produksi 12 kilometer dan agak kurang bagus. Kita menyarankan kepada Pemkab Banyuasin untuk memperbaiki jalan produksi itu. Kalau jalan itu diperbaiki, Insha Allah ikan di Banyuasin bisa di bawa ke Palembang, Musi Rawas, dan mungkin diekspor,” papar Fauzih.

Di sisi lain, dengan potensi perikanan yang luar biasa, yakni hampir 2,5 juta hektar dengan produksi mencapai 120 ton per hektar berdasarkan data dari Dinas Perikanan, politisi dapil Sumsel itu meyakini pentingnya kehadiran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM). ■ nt/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membacakan puisi dalam acara Panggung Puisi dan Musik, Peringatan 20 Tahun Reformasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/5). Foto: Jaka/hr



Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memperingati *International Internal Audit Awareness Month of May* atau Bulan Kesadaran Audit Internal Internasional pada bulan Mei, Jum'at (4/5) Foto: Andri/hr



Kunjungan Tim Monitoring Biro Pemberitaan Parlemen Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI ke Perpustakaan Provinsi dan Universitas Negeri Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur (7-10/5) Foto: Suci/hr



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mau motor
Zaman now?

IKUTI LOMBA
KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY
MEME (gambar, karikatur, video)
ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:
19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018
PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE:

SAAT PENGUMUMAN
DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



@LombaKritikTerbaikDPR



@LombaKritikDPR



@lombakritikterbaikDPR